

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU NOMOR: (0181/PDT.G/2017/PA.PBR)
MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM BERPOLIGAMI**

SKRIPSI



OLEH

MUHAMMAD HIDAYAT
NIM. 11421100523

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU NOMOR: (0181/PDT.G/2017/PA.PBR)
MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM BERPOLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

MUHAMMAD HIDAYAT
NIM. 11421100523

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: (0181/PDT.G/2017/PA.PBR) MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM BERPOLIGAMI*, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hidayat
 Nim : 11421100523
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 November 2019 M
 04 Rabiul Awal 1441 H
 Pembimbing skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP: 197101011997031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: (0181/PDT.G/2017/PA.PBR) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami*, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD HIDAYAT**
 NIM : 11421100523
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

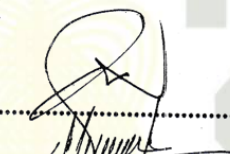
Telah di munaqasyahkan pada :


Hari / Tanggal : Selasa, 12 November 2019
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

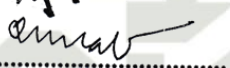
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 Sekretaris
Syukran, M.Sy
 Penguji I
Kamiruddin, M.Ag
 Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A








Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar Hasan, M.Ag
 NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama pekanbaru nomor : (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr). mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami.

Perkara ini terjadi bermula dari adanya laporan dari pihak ke ketiga kepada pemohon yang mengaku sebagai pihak keluarga dari istri pertama si termohon I. Dan dari laporan tersebut diketahuinya bahwa status tergugat yang ternyata menikah untuk kedua kalinya dengan termohon II ternyata menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan istri prtamanya. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan untuk berpoligami, yang mengakibatkan perkawinan poligami tersebut dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk dijadikan penulisan skripsi ini.

Untuk mengetahui pembatalan perkawinan tersebut maka ada tiga hal poin yang menjadi fokus dalam permasalahan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana putusan prosedur hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami, bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan perkawinan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum nomatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Apabila dilihat dari sifat pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan situasi apapun. Ketentuan poligami diatur didalam al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3, dan juga diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. untuk melakukan poligami calon mempelai harus memenuhi syarat poligami tersebut yang

ditetapkan oleh kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia tepatnya didalam pasal 56 dan 57.

Kesimpulan dari penelitian ini baik dengan analisis hukum Islam maupun hukum positif dapat disimpulkan, bahwa dalam proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor : (0181/PDT.G/2017/PA.PBR). dinyatakan oleh hakim perkawinan tersebut resmi dibatalkan. Secara garis besar perkawinan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan *kemaslahatan* yakni meminimalisir *kemudorotan*. Akibat dari pembatalan tersebut, maka perkawinan poligami yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II secara resmi dibatalkan oleh hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dan pernikahan poligami tersebut dinyatakan tidak ada lagi hubungan suami isteri yang berlaku didalam hubungan poligami mereka tersebut.

Kata Kunci : Pembatalan, Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa pula Sholawat bersertakan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau di ahirat kelak.

Skripsi ini berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: (0181/Pdt.G/2017/Pa.Pbr) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami". Skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhsyiyah (AH), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dan penulis juga menyadari akan banyaknya kekurangan yang penulis lakukan. Maka dari itu mohon dimaafkan apabila menemukan banyaknya kekurangan yang terdapat didalam skripsi yang penulis buat ini. Dan tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan ribuan terimakasih sebanyak-banyaknya yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Abah/Ayah Abd. Kamar.U. (Almarhum) dan Mak/Ibu Rainah yang tercinta dan tersayang yang telah banyak meluangkan waktu, mengasi nasehat, selalu berdoa sepanjang waktu dengan ikhlas dari hati yang paling dalam, motivasi yang tiada henti yang diberikan, serta selalu mendukung selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu persatu. Semoga abah/ayah (Almarhum) dan mak/ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. beserta wakil rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syarih dan Hukum Bapak Dr. Drs. H. Hajar Hasan, M.Ag beserta wakil dekan I, II Dan III.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Ketua jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhsiyyah (AH) bapak H. Akmal Abdul Munir, LC., MA dan Sekertaris jurusan bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. yang telah banyak membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag yang telah membimbing dan memberi arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademik ibu Asmiwati, Dra.MA yang selalu membimbing dan selalu memberikan solusi ketika penulis mengalami masalah selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen serta pegawai dilingkungan fakultas syariah dan hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Segenap keluarga penulis abah/ayah (Almarhum), mak/ibu, Abang, kakak yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa dan bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik dari dunia maupun akhirat kelak. Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi yang penuh dengan kekurangan ini untuk kedepannya. Atas ketelitian dan sarannya penulis mengucapkan ribuan terimakasih, semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

Pekanbaru, Oktober 2019,

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD HIDAYAT

NIM : 11421100523

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM HAKIM DAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA	
A. Hakim	13
1. Pengertian Hakim	13
2. Dasar Hukum Hakim.....	14
3. Syarat-Syarat Hakim	15
B. Pengadilan Agama Di Indonesia	16
1. Pengertian Pengadilan	15
2. Dasar Hukum Pengadilan	16
C. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama pekanbaru	17
D. Asas-Asas Pengadilan Agama Pekanbaru	25
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	28
F. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru.....	30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (FASKH) DAN POLIGAMI

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan (<i>Faskh</i>).....	34
1. Pengertian Pembatalan (<i>Faskh</i>).....	34
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	37
3. Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan Menurut KHI.....	39
4. Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqih Islam.....	39
5. Perbedaan fasakh dan talaq	41
6. Hikmah Terjadinya Pembatalan Perkawinan	46
B. Pemalsuan Identitas	46
1. Pengertian Pemalsuan	46
2. Dasar Hukum Pemalsuan	51
3. Bentuk-Bentuk Pemalsuan	53
C. Pengertian Poligami	55
1. Dasar Hukum Poligami	60
2. Syarat Poligami Menurut Islam.....	62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: (0181/PDT.G/2017/PA.Pbr) MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM BERPOLIGAMI

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.	65
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.....	74
C. Analisa Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98

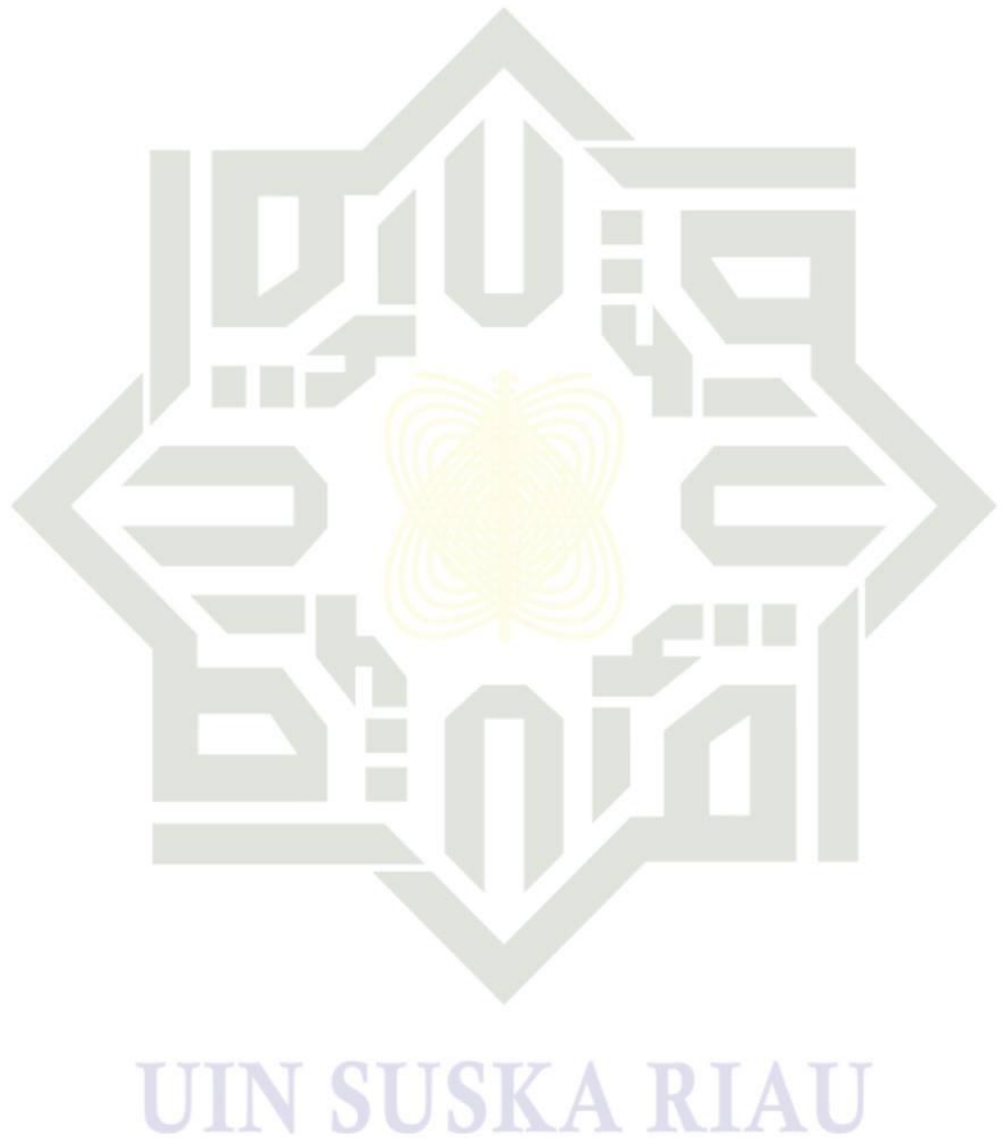
DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pengadilan Agama Pekanbaru Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2017	32
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan awal untuk menuju kehidupan sosial dilingkungan masyarakat dengan satu tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Perkawinan tidak hanya mengikat antara satu orang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan perkawinan juga melibatkan dua keluarga bahkan lebih, karena itu jika ada permasalahan yang timbul, penyelesaian yang dilakukan haruslah mempertimbangkan kelangsungan hubungan baik dengan keluarga yang bersangkutan.

Meskipun telah diterangkan dalam pasal 22 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI tentang tujuan perkawinan, perceraian masih tetap menduduki perkara tertinggi di lingkungan Pengadilan Agama. hal ini karena Islam telah memberikan hak kepada suami dan istri untuk membubarkan perkawinan dengan berbagai cara yang telah diatur dengan berbagai syarat yang harus terpenuhi, pembubaran ini diatur dengan cara *Khulu'*, *Talak*, dan *faskh*.¹

Perkawinan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum Agama dan hukum negara Indonesia. Perkawinan yang awalnya sah dimata hukum dan Agama

¹Undang-Undang Perkawinan, Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *Tentang Tujuan Perkawinan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

terkadang dibatalkan atau rusak (*Faskh*) dan orang-orang yang bersangkutan (salah satu pasangan murtad) atau oleh pihak yang berwenang (Hakim).

Faskh sendiri berarti yang merusak atau membatalkan, *faskh* bisa terjadi karena²:

1. *Faskh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, misalnya, setelah akad nikah diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. *Talak* ialah memutuskan tali pekawinan yang sah, baik sekarang atau dikemudian hari oleh pihak suami dengan kata-kata tertentu. Adapun penyebab terjadinya talak yaitu karena adanya nusyuz dari pihak istri, nusyuz suami terhadap istrinya.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak kewajiban suami istri dalam keluarga yang meliputi: hak atas suami istri, hak istri terhadap suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istri yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.³ Dalam kajian Hukum keluarga Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *Taklifi*, maupun hukum *Wad'i*, bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai *fasid* atau batal.⁴

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat, Cet II*, (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2006), hal.142

³ Thiani Sobari Sahrani, *Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 153

⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: prenda media, 2004), hal. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, bergiliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami) Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Yang dijeaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi⁵:

وَأِنْ حَفَّتُمْ اللَّأْتِفَسِطُوا فِي الْيَتَمِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَتَعَدُّوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”.*(Q.S An-Nisa : 3)⁶.

Dalam ayat ini Allah SWT. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahnya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal.130

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja⁷.

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup, hal ini yang tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.⁸ Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan hukum Islam agar dipandang sah, pelaksanaan Pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat rukun perkawinan.⁹ Dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.¹⁰

Pasal 9 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat Perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari Pengadilan. Dengan demikian Poligami yang akan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan Identitas palsu dan adanya unsur penipuan, maka terdapat perbuatan melanggar hukum dan merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya Perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang istri.

⁷ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Penerjemah: Asep Sobari, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal. 726

⁸ Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1

⁹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). Hal. 30-31

¹⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan Perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan keidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.¹¹

Pemalsuan tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik dilaksanakan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Dibawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan pernah terwujud secara sempurna kecuali suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit, selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan Ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.¹²

Kasus yang penyusun teliti bermula adanya perkawinan antara Rudi Hidayat (Tergugat I) dan Dika Irawati (Tergugat II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecaatan Pekanbaru Kota, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 587/33/XII/2015.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang). Hal.212

¹² Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2008). Hal.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat akat nikah dilangsungkan Rudi Hidayat mengaku secara lisan bersetatus jejak dengan bukti yang menerangkan bahwa Rudi Hidayat belum kawin semua suratnya hilang, padahal sudah beristri dan belum mempunyai anak. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji khusus mengenai alasan perkara pembatalan perkawinan ini diajukan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut. Maka penulis akan membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr) MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM BERPOLIGAMI”**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana prosedur Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoigami Nomor : (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr).?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoigami Nomor : (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr).?
3. Bagaimana Analisi Hukum Islam Pengadilan Agama Pekanbaru Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoigami Nomor : (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr).?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan berpoligami dengan perkara : (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr).
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Islam Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap putusan pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami Nomor: (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya, adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian khususnya dalam pembatalan perkawinan.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
- c. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk studi kasus penelitian kepustakaan (*Library Resech*), yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung di Pengadilan Agama Pekanbaru dan juga dapat membaca dan peroleh buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan, baik buku-buku primer maupun sekunder.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian sendiri peneliti mengambil dari obyek penelitian berupa Putusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor perkara: (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr).

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Seperti: Putusan Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan, Al-Qur'an, Kitab Hadis UU Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: Rancangan Undang-Undang, Hasil Penelitian, atau Pendapat Para Pakar Hukum. Dan seterusnya, dalam hal ini penulis akan menganalisa rumus masalah yang diperoleh dari Putusan Hakim, literatur-literatur hukum. Serta semua bahan yang berkaitan dengan Pemalsuan UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

c. Bahan tersier

Yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang peneliti gunakan penulisan Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana putusan hakim tentang pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami, dan akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan putusan, buku, dan sebagainya yang berkaitan tentang pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan data-data yang baik melalui buku-buku, dokumen majalah internet (web).
- b. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan Teknik Analisi Isi (*Content Analisis*). Yaitu suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari pesan suatu komunikasi, metode ini, penulis gunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan, yakni metode analisis isi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam Bab Ini Penulis Menjelaskan Tentang Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penulisan, Teknik Analisis Data Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam Bab Ini Penulis Menjelaskan Tentang Gambaran Umum Pengertian Hakim, dasar hukum hakim, syarat menjadi hakim Pengadilan agama, Pengertian pengadilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Meliputi Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru, Asas-Asas Pengadilan Agama, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru, Serta Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB III : Dalam Bab Ini Penulis Menjelaskan Teori Umum Tentang Pembatalan Perkawinan Dan Poligami, Yang Terdiri Dari: Pengertian Pembatalan Perkawinan, Dasar Hukum Tentang Pembatalan Perkawinan, syarat sah Terjadinya Pembatalan, hikmah pembatalan perkawinan, Pengertian Pemalsuan, Dasar Hukum Pemalsuan, Bentuk-Bentuk Pemalsuan, Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat Poligami Menurut Islam.

BAB IV : Bab Ini Penulis Membahas Mengenai Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

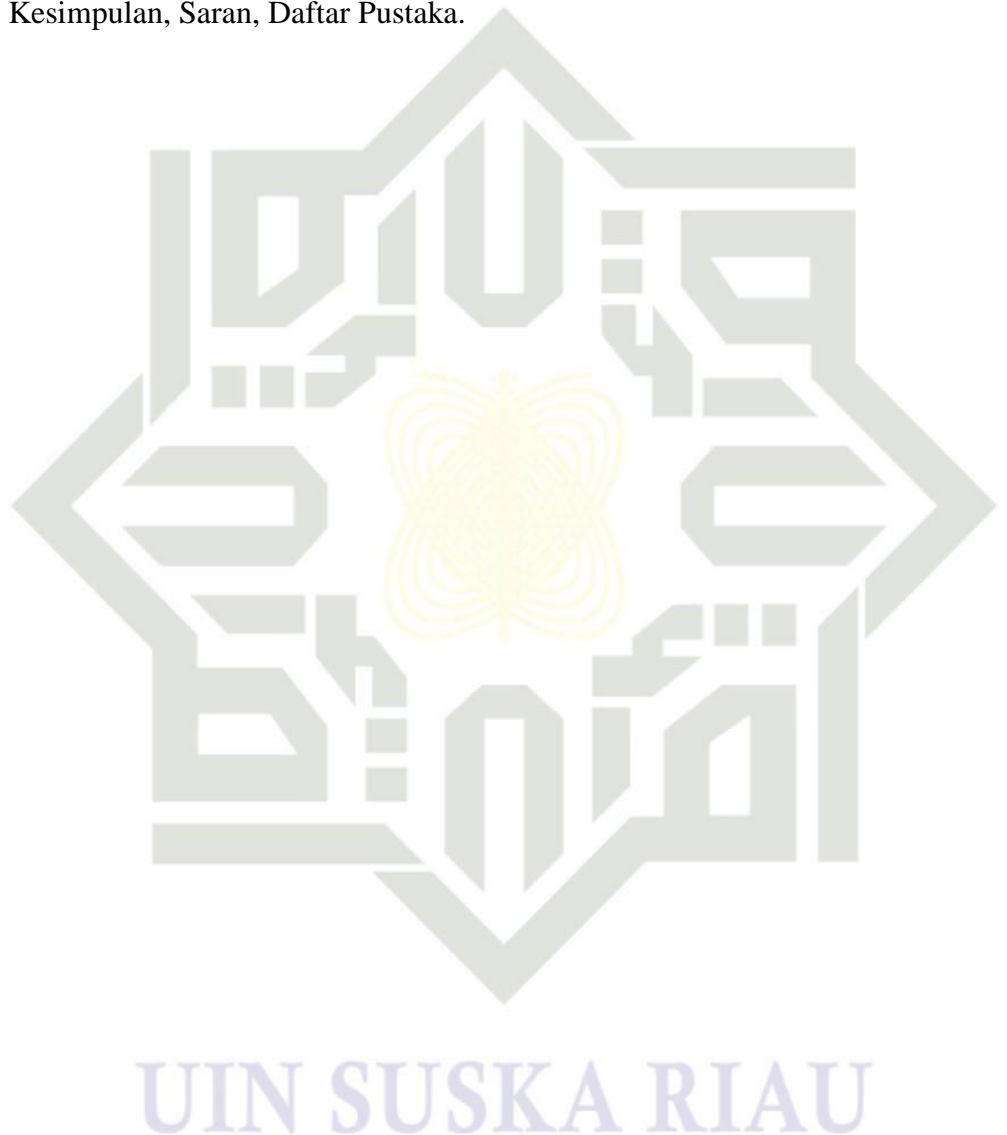
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:
 (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr) Mengenai Pembatalan Perkawinan
 Akiba Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami.

BAB V : Bab Ini Adalah Bab Penutup, Pada Bab Ini Terdiri Dari
 Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAKIM DAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fiqih kata hakim juga sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan *Qadhi*.¹³

Adapun pengertian menurut *Syar'a Hakim* yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁴

Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁵

¹³ <http://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/alhakim/> di unduh selasa 25 Desember 2018 pukul 19.49

¹⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hal.29

¹⁵ Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Hakim

Di dalam Islam Dijelaskan didalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat : 49 bahwa untuk memutuskan suatu perkara yang berbunyi :

وَأَنِ حَكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِسُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

Artinya: *“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. dan berwaspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memeperdayakana engkau terhadap sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”* (Q.s. Al-ma'idah:49)¹⁶

Sedangkan dasar hukum seorang hakim secara umum dijelaskan didalam undang-undang No. 19 Tahun 1964 baik itu Hakim pengadilan Agama, maupun Hakim Pengadilan Negeri dijelaskan didalam undang yang berisi : Bab I, tentang ketentuan umum, Bab II, tentang kekuasaan hakim, Bab III, tentang Hubungan Pengadilan dengan Pemerintah, Baba IV, tentang Hakim dan kewajibannya, Bab V, pelaksanaan Putusan, dan Bab VI, tentang bantuan hukum. Semua penjelasan ketentuan-ketentuan pokok hakim tercantum didalam undang-undag No.49 Tahun 1964.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani,

¹⁷ Undang-Undag Dasar No.49 Tahun 1964, *Penjelasan Ketentuan-Ketentuan Pokok*

3. Syarat-Syarat Hakim

- **Hakim Pengadilan Agama**

Untuk menjadi hakim Pengadilan Agama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama¹⁸ ;

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.
- f. Sehat Jasmani dan Rohani.
- g. Berwibawa, Jujur, Adil, dan Berkelakuan tidak Tercela.
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat dalam gerakan 30 september atau partai komunis Indonesia.

¹⁸ <http://www.gresnews.com/berita/tips/112701-syarat-calon-hakim-pengadilanagama/> di

unduh Selasa 25 Desember 2018 pukul 20.05

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengadilan Agama Di Indonesia

1. Pengertian Pengadilan

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal dibawah hukum.¹⁹ Dalam negara dengan sistem *Common Law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan pengadilan.

Sedangkan pengertian Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota, kabupaten, atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden.²⁰

2. Dasar Hukum Pengadilan Agama

Dasar Hukum dari Pengadilan Agama sendiri diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama didalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan didalam undang yang berisi : Bab I, tentang ketentuan umum, Bab II, tentang susunan pengadilan, Bab III, tentang Kekuasaan Pengadilan, Bab IV, tentang Hukum Acara, Bab V, Ketentuan-Ketentuan lain, dan Bab VI,

¹⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan> di unduh selasa 25 Desember 2018 pukul

²⁰ <http://id.m.wiki/Pengadilan-agama>.

tentang Ketentuan Peralihan. Semua penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengadilan Agama yang tercantum didalam undang-undang No. 7 Tahun 1989.²¹

C. Sejarah Berdirinya Peradilan Agama Pekanbaru

Kehadiran Peradilan Agama di Indonesia, telah ada jauh sebelum Indonesia medeka. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai medan akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat muslim, namun sekaligus juga sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.²²

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah dikenal peradilan dikalangan masyarakat, yaitu Peradilan Perdamaian Keluarga atau Perdamaian Kampung, Peradilan Padu dan Peradilan Pradata. Peradilan Perdamaian Keluarga atau Perdamaian kampung merupakan peradilan sehari-hari dan sewaktu-waktu diperlukan oleh masyarakat. Sementara Peradilan Padu mengurus perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh hakim di Peradilan Perdamaian Kampung. Hukum materilnya bersumber dari hukum tidak tertulis. Sedangkan Peradilan

²¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengadilan Agama*

²² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pradata berwenang mengurus perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.²³

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang cukup tua keberadaannya. Peradilan Agama sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerjaan Islam di Nusantara, seperti peradilan yang ada di Kerajaan Mataram (kurang lebih tahun 1610-1645) yang dikenal dengan Peradilan Serambi, karena tempat mengadili diadakan di serambi masjid dan hakim-hakimnya diangkat oleh Sultan.²⁴

Tahun 1677 merupakan permulaan jatuhnya kerajaan mataram dan awal semakin deras masuknya pengaruh Belanda yang ketika itu menjajah kepulauan Nusantara kedalam pemerintahan termasuk badan-badan peradilan. Sehingga terdapat keragaman nama dan peraturan perundang-undangan mengenai badan Peradilan Agama di Indonesia. Di Jawa dan Madura digunakan istilah Peradilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi, di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur digunakan istilah Kerapatan Qadi dan Pengadilan Qadi Tinggi, di Aceh digunakan istilah Mahkamah Syar'iyah Jeumpa, di Palembang digunakan istilah Qadi Syara, di Makasar digunakan istilah Syara Tanette, di Bima digunakan istilah Badan Hukum Syara.²⁵

Pada masa penjajahan Jepang, Peradilan Agama masih dipertahankan dan tidak ada perubahan hukum sebagai dasar pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia kecuali perubahan nama Pengadilan Agama menjadi *Sooryo Hoin*

²³ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 12

²⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), hal. 1

²⁵ *Ibid.*, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

dan Mahkamah Islam Tinggi berubah nama menjadi *Kaikyoo Kooto Hoin*.²⁶ Pada masa ini juga Peradilan Agama sempat terancam karena adanya pertentangan antara tokoh nasional golongan Islam untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama, sementara golongan nasionalis menginginkan Peradilan Agama dihapus karena negara harus memisahkan antara urusan agama, serta urusan negara tidak perlu berdasarkan Hukum Islam.²⁷

Kemudian pasca kemerdekaan, dalam UUD 1945 keberadaan Peradilan Agama diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman.

Dengan adanya UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman keberadaan Peradilan Agama diakui secara formal. Namun mengenai susunan dan kekuasaannya masih beragam, sementara hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta hukum acara peradilan Islam.²⁸

Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Adapun ketentuan dalam PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura tersebut adalah dimuat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah

²⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.al 11-12

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Sulaikin Lubis, *LOC., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Kemudian dalam Pasal 11 menegaskan bahwa apabila tidak ada ketentuan lain, di ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau lebih daerah Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama.²⁹

Berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura tersebut maka dibentuk Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 1957 yang dicantumkan dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.³⁰

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama di Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada Pasal 1 mengatur bahwa tempat-tempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersendiri di Kota Pekanbaru.³¹

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan yang berada di Pekanbaru, maka diusulkanlah Pimpinan Pengadilan

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 123

³⁰ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³¹ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995), hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru K.H. Abdul Malik yang merupakan anggota Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur yang merupakan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Bukittinggi, K.H. Djunaidi sebagai Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakrta Selatan pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru.³²

Kemudian pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Pada tahun-tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang beragama Islam di Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perselisihan perkawinan atau talak ke Kantor Urusan Agama. Selain itu masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Kemudian antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

³² SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili perkara-perkara seperti waris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, Pengadilan Agama bertugas memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, talak, rujuk, fasakh, mahar, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan syarat ta'lik talak sudah berlaku.³³ Namun masalah waris merupakan wewenang Pengadilan Negri berdasarkan Stadblad Nomor 152 yaitu Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka seringkali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP Nomor 45 tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negri.³⁴

Pengadilan Agama Pekanbaru, pada mulanya hanya menempati sebuah ruanagan kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama

³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-2, hal. 105

³⁴ Abbas Hasan, *Op.Cit.*, hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru di jalan Rambutan kecamatan Pekanbaru Kota, yang kemudian melanti Abbas Hasan sebagai Panitera pada Agustus 1959. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi kecamatan Pekanbaru Kota. Pada tahun 1969 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota³⁵

Pada tahun 1970 ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang pertama, K.H. Abdul Malik meninggal dunia. Maka kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya merupakan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke jalan Singa kecamatan Sukajadi dengan menyewa rumah penduduk. Dan sekitar tahun 1976 berpindah lagi ke jalan Kartini kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke jalan Pelanduk kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian kepemimpinan. Diantaranya:

1. Drs. Marjohan Syam (1988-1994)
2. Drs. Abdulrahman HAR, SH (1994-1998)
3. Drs. H. Lumban Hutabarat SH, MH (1998-2001)
4. Drs. Zein Hasan (2001-2002)
5. Drs. H. Harun S, SH (2002-2006)

³⁵ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH (2006-2010)
7. Drs. H. Firdaus HM, SH, MH (2010-2012)
8. Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015)
9. Drs. Syaifudin, SH, M.Hum (2017-sekarang)

Sedangkan alamat kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalan Rambutan No. 20 (1958-1966)
2. Jalan Riau Lama (1966-1971)
3. Jalan Sam Ratulangi (1971-1973)
4. Jalan Singa (1973-1976)
5. Jalan Kartini (1976-1985)
6. Jalan Pelanduk No.21 (1985-2007)
7. Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 (2007-2015)
8. Jalan Parit Indah/Datuk Setia Maharaja (2017-sekarang)

Terjadinya perpindahan tersebut sampai berulang kali disebabkan karena Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada kantor Kanwil Pertanian Propinsi Riau, Kanwil Depag dan bahkan menyewa rumah penduduk.

Perjuangan panjang menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru hingga semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau, Arifin Ahmad yang berkenaan membayar sewa rumah penduduk untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru serta menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru di komplek

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kanwil Depag Propinsi Riau. Kemudian Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sejak 30 juni 2004, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Peradilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, terhitung sejak 30 juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, semua badan peradilan, termasuk Peradilan Agama telah berada dibawah naungan Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan lainnya.

D. Asas-Asas Pengadilan Agama

Pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat beberapa asas umum pada lingkungan Peradilan Agama. Asas-asas umum itu merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh undang-undang tersebut. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Asas personalitas keIslaman

Maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Maka terdapat beberapa penegasan dalam asas tersebut, diantaranya:³⁶

- a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara yang disengketakan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu itu berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam.

2. Asas kebebasan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan Negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya dan dari pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan pelaksana sebagian dari kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan kehakiman.

3. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan

Persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁷ Sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai penyelesaian perkara. Cepat, berhubungan dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses persidangan. Dan biaya ringan berkaitan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan.

³⁶ Ibid.hal. 163

³⁷ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. Ke-2, hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas wajib mendamaikan

Hal ini sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang dikenal dengan konsep *ishlah*. Asas ini semakin penting karena Peradilan Agama identic dengan peradilan keluarga.³⁸ Dengan demikian Peradilan Agama disamping sebagai pranata hukum, juga sebagai pranata sosial yang berfungsi menanggulangi keretakan-keretakan dalam keluarga.

5. Asas pemberian bantuan

Dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) Undng-Undang Nomor 14 tahun 1970 ditegaskan bahwa Pengadilan membantu para pencari kedailan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan pasal tersebut, dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan hakim aktif memberikan bantuan kepada pihak yang berperkara. Bantuan tersebut terbatas pada pemberian nasehat yang berkaitan dengan masalah formil. Hakim tidak dapat memberikan bantuan yang berkaitan dengan masalah materil atau pokok perkara.³⁹

6. Asas persidangan terbuka untuk umum

Pada dasarnya semua persidangan di lingkungan Peradilan Agama terbuka untuk umum, yaitu dapt dilihat, didengar dan diikuti prosesnya oleh masyarakat umum. Namun terdapat pengecualian dalam asas ini, seperti yang ditegaskan dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.* hal. 164

³⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14 tahun 1970 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Sedangkan pembacaan putusannya dalam persidangan terbuka untuk umum.⁴⁰

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur tentang susunan Pengadilan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri Pimpinan (ketua dan wakil ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteran dan Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, beberapa orang Panitera Pengganti dan Jurusita. Sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum.

Adapun struktur Pengadilan Agama Pekanbaru ketika Penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. Syaifuddin, S.H., M. Hum |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. Mardanis, S.H., M.H |
| 3. Majelis Hakim | : 1) H. Asli Sa'an, S.H |
| | 2) Drs. H. Muhammad Dj |
| | 3) H. Abd. Rahim, S.H |

⁴⁰ *Ibid.*, hal 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| 4. | Panitera | : | Azwir, S.H |
| 5. | Panitera Muda Gugatan | : | Zahniar, S.H |
| 6. | Panitera Muda Permohonan | : | Hj. Umi Salmah, S.H |
| 7. | Panitera Muda Hukum | : | Fakhriadi, S.H., M.H |
| 8. | Panitera Pengganti | : | 1) Hj. Marsyidah, S.H |
| | | | 2) Akhyar, S.H |
| | | | 3) Wan Wahid, S.H |
| | | | 4) Ernawati, S.H |
| | | | 5) Hj. Yenni, S.H |
| | | | 6) Drs. H. M. Nasir As, S.H |
| | | | 7) Asmidar, S.Ag |
| | | | 8) Zulfahmi, S.Ag., M.H |
| | | | 9) Hidayati, S.Ag |
| | | | 10) Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H |
| | | | 11) Erdanita, S.Ag, M.H |
| | | | 12) Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H |
| 9. | Jurusita | : | 1) Syukri |
| | | | 2) Aguslim |
| | | | 3) Khairul Anuar, S.H |
| | | | 4) Wawan Suwandi, S.H |
| 10. | Jurusita Pengganti | : | 1) Hidayah |
| | | | 2) Komaria |
| | | | 3) Rini Artati |
| | | | 4) Habibunnazar |
| | | | 5) Almisri |

- 4) Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H
- 5) Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum
- 6) Drs. H. Andi M. Akil, M.H
- 7) Drs. H. M. Zakaria, M.H
- 8) Dra. Hj. Ilfa Susianti, M.H
- 9) Drs. Ali Amran, S.H
- 10) Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H
- 11) Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H
- 12) Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H
- 13) Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H
- 14) Drs. Asfawi, M.H
- 15) Drs. Miranda
- 16) Drs. H. Sasmiruddin, M.H
- 17) Drs. Abd. Gani, M.H
- 18) Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H
- 19) Drs. H. Barmawi, M.H
- 20) Dra. Hj. Detwati, M.H
- 21) Drs. Muslim Djamaluddin, M.H
- 22) Drs. Abdul Aziz, M.H.I
- 23) Drs. Asyari, M.H
- 24) Drs. Sayuti, M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- | | |
|--|-----------------------|
| 11. Sekretaris | 6) Adek Hendra |
| 12. Kasubbag Umum dan Keuangan | 7) Sugeng, S. Kom |
| 13. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan | : Samsir Toona, S.H.I |
| 14. Kasubbag Kepegawaian | : Sutikno Hady, S.H |
| | : Hj. Erniati, S.H |
| | : Anita Febrina, S.E |

F. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun tugas Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- | | |
|---------------|------------------|
| a. Perkawinan | e. Wakaf |
| b. Waris | f. Infak |
| c. Wasiat | g. Shadaqah |
| d. Hibah | h. Ekonomi Islam |

Perubahan kewenangan –kewenangan baru, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bidang ekonomi syari’ah yang merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 huruf I, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip sayri’ah, antara lain meliputi:⁴¹

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Bank syari’ah | f. Obligasi sraia’ah dan surat berharga berjangka syaria’ah. |
| b. Lembaga keuangan mikro syari’ah | g. Sekuritas sayari’ah |
| c. Asuransi syari’ah | h. Pembiayaan syari’ah |
| d. Reasuransi syari’ah | I. Pengadilan syari’ah |
| e. reaksa dana syari’ah | |

⁴¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke-1, hal. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut.⁴² Artinya adalah kekuasaan Pengadilan Agama meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara berdasarkan jenis perkara. Pekanbaru berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:⁴³

- | | |
|---------------|---------------------|
| a. Perkawinan | e. Wakaf |
| b. Waris | f. Infak |
| c. Wasiat | g. Shadaqah |
| d. Hibah | h. Ekonomi syari'ah |

4. Pengertian Putusan

Putusan secara pengertian umum merupakan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Produk hakim dari hasil

⁴² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Ke-2, hal. 53

⁴³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemeriksaan perkara dipersidangan ada 3 macam yaitu : putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil dari musyawarah antara dalam pihak sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.⁴⁴

Adapun jumlah dan jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁴⁵

Tabel II.1
Pengadilan Agama Pekanbaru
Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Total
1.	Penujukan orang lain sebagai wali	0 perkara
2.	Pencabutan kekuasaan wali	0 perkara
3.	Perwalian	10 perkara
4.	Pencabutan kekuasaan orang tua	0 perkara
5.	Pengesahan anak	0 perkara
6.	Hak-hak bekas istri	0 perkara
7.	Nafkah anak oleh ibu	1 perkara
8.	Penguasaan anak	19 perkara
9.	Harta bersama	35 perkara
10.	Cerai gugat	1252 perkara
11.	Cerai talak	454 perkara
12.	Kelalaian atas kewajiban	0 perkara
13.	Pembatalan perkawinan	3 perkara
14.	Penolakan perkawinan oleh PPN	0 perkara
15.	Pencegahan perkawinan	0 perkara
16.	Izin poligami	2 perkara

⁴⁴ <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/11/21/putusan-peradilan-agama-oleh-rahmat-yudistiawan/> di unduh hari jumat 3 januari 2020.

⁴⁵ Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17.	Ganti rugi terhadap wali	0 perkara
18.	Asal usul anak	2 perkara
19.	Penetapan kawin campur	0 perkara
20.	Isbat nikah	22 perkara
21.	Izin kawin	0 perkara
22.	Dispensasi kawin	9 perkara
23.	Wali adhal	2 perkara
24.	Pengangkatan anak	0 perkara
25.	Ekonomi syari'ah	1 perkara
26.	Kewarisan	23 perkara
27.	Wasiat	0 perkara
28.	Hibah	0 perkara
29.	Wakaf	0 perkara
30.	Zakat/infak/shadaqah	0 perkara
31.	P3HP	38 perkara
32.	Lain-lain	11 perkara
Total		1884 perkara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (*FASKH*) DAN POLIGAMI

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan (*Faskh*)

1. Pengertian Pembatalan (*Faskh*)

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal, sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁴⁶

Menurut pendapat yang lain *Faskh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami istri yang disebabkan suatu yang hakikatnya hak suami istri disebabkan suatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. *Faskh* diisyatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.⁴⁷

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *takhlifi* maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah dan bisa bernilai *Fasad* (*Fasid*) atau batal (*bathil*). *fasad* dan *Faskh* nilai pada

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 2013).hal

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal 105

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakiktnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan keduanya, sebab apa yang disebut *Faskh* sebagian dianggap sebagai *Fasad* sebagaimana lainnya.⁴⁸

Dalam hukum Islam, pembatalan pernikahan disebut dengan *Faskh*. *Faskh* berarti dicabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqh.⁴⁹

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sebagai berikut: “Pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami, yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah telanjur menyalahi hukum pernikahan”.⁵⁰ Definisi tersebut diatas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *Faskh* itu.⁵¹

Selanjutnya definisi tersebut menurut Amir Syarifuddin mengandung beberapa kata kunci, yaitu: *Pertama*: kata “pembatalan” mengandung arti *Faskh* yaitu mengahiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. *Kedua*: kata “ikatan pernikahan” mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya, itu adalah

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV, Pustaka Setia, 2000), hal.87

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dalam Agama*, (Bandung: Mandarmaju, 2003) hal.41

⁵⁰ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, 2002), hal. 145

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-3, 2009), hal.242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan pernikahan bukan terhadap yang lainnya. *Ketiga:* kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah di Lembaga Peradilan Agama, bukan di yang lain. *Keempat:* Kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *faskh*, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan atau pernikahan itu berlangsung menyalahi ketentuan hukum pernikahan.⁵²

Apabila ditelusuri secara mendalam perihal putusannya ikatan nikah, yang terjadi oleh inisiatif suami yang disebut dengan talak, ada karena inisiatif istri dengan jalan mengajukan ganti rugi kepada suami yang disebut dengan *khuluq*. *Faskh* (pembatalan) pernikahan, bisa saja terjadi karena istri, suami dan oleh pihak ketiga yaitu hakim setelah mengetahui bahwa pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pernikahan yang telah berlangsung ternyata terjadi kesalahan, seperti tidak terpenuhinya yang telah ditentukan baik itu pada suami atau istri.

Adapun pengertian pembatalan nikah (*Faskh*) menurut ulama Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah *fasid* adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah

⁵² *Ibid.*, hal.243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh *syara'*. Hukum nikah kedua bentuk pernikahan itu adalah sama saja yaitu tidak sah.⁵³

Adapun pengertian Pembatalan perkawinan menurut umum adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan Agama mempelai, Jika menurut Agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁵⁴

Dalam pasal 22 UU perkawinan disebut bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU NO. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26, dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71.

Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Hukum pembatalan nikah pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila dilihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan bentuk tertentu itu.⁵⁵

Adapun dasar hukum Islam tentang pembatalan perkawinan menurut Islam disini dikemukakan ayat al-Qur'an dan hadist hadist yang

⁵³ Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.40

⁵⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosada Karya, 1991), hal 83

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2014) hal.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat An-Nisa: 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadia pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (22) Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-nisa : 22-23)⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat Terjadinya Pembatalan perkawinan menurut KHI

Fasakh/batalnya perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat syarat ketika berlangsung akad nikah, yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batasan umum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1. tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.⁵⁷

4. Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqih Islam

Dalam hukum Islam (Fiqih Islam) ada dua keadaan yang memungkinkan pasangan untuk memutuskan pernikahan yang pertama dengan talaq atau cerai, kedua dengan *fasakh* yaitu pembatalan ikatan antara seorang istri dengan suaminya yang telah diketahui atas sebab tertentu.

Didalam perkawinan terkadang seorang wanita mensyaratkan kepada orang yang meminangnya dengan persyaratan tertentu agar bisa menikahinya. Jika persyaratan yang ditetapkan itu menegakkan dan memperkuat akad nikah, seperti syarat nafkah agar menggauli maka harus

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Disalin Dari “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Keseimbangan Islam Departemen Agama, 2001 Bab XI Pasal 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi, namun jika persyaratan itu merusak akad nikah, seperti diisyaratkan untuk boleh bersenang-senang dengannya, maka syarat seperti itu tidak perlu dipenuhi, karena bertentangan dengan tujuan pernikahannya dan jika persyaratan itu wajib dipenuhi dan bisa dilakukan pembatalan (*fasakh*) pernikahan.

Begitu juga dengan masalah karena hal-hal lain yang datang kemudian setelah akad seperti penipuan yang menguntungkan diri sendiri, atau pergaulan jika ditemukan permasalahan dalam melakukan hubungan suami istri, seperti ditutupinya lubang kemaluan, tumbuhnya tulang an buntutnya kemaluan bagi laki-laki, maka bisa ditetapkan khiyar. *Fasakh* terjadi akibat beberapa alasan, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan sehingga menjadikannya tidak sah, misalnya nikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali.
- b. Adanya hal-hal yang merusak pernikahan setelah terjadinya akad, misalnya salah satu berpindah agama, terjadinya *gharar* (penipuan) dengan bermaksud menguntungkan diri sendiri. Adanya niat untuk melakukan kesenangan sementara setelah merasa senang akan melakukan perceraian.
- c. Adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami istri salah satunya dapat memilih apakah perkawinan tersebut dapat dilanjutkan atau dibatalkan (*fasakh*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ktidak mampuan suami dalam memberikkan mas kawin atau nafkah.
- e. Suami mahfud atau hilang tanpa ada kabar berita.⁵⁸

Perbedaan Fasakh Dan Talaq

- a. Fasakh tidak mengurangi bilangan jumlah talak;
- b. Talaq tidak menyebabkan gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah;
- c. Fasakh dapat menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk memberi nafkah walaupun istrinya dalam keadaan hamil;
- d. Talaq sebelum melakukan hubungan intim, wajib baginya (suami) untuk membayar setengah mas kawin yang disebut pada saat melaksanakan akad nikah.
- e. Fasakh karena yang dilakukan istri sebab adanya aib yang baru diketahui setelah terjadinya hubungan intim, maka wajib bagi suami untuk membayar mahar mitsli.⁵⁹

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan menurut UU No. 1/1974 di antaranya adalah sebagai berikut: Pasal 22 : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”Pasal 24:“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini.”Pasal 26:“(1) Perkawinan yang

⁵⁸ Selamet abiding dan aminudin, *fiqih munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

⁵⁹ <https://blogpenahitam.blogspot.com/2016/04/perbedaan-fasakh-dan-talak.html?m=1>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”Pasal 27:“(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁶⁰

Di dalam pasal 70 KHI dinyatakan perkawinan batal (demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj’i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu.

⁶⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 544-545

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUP No. 1/1974.

Pasal 72:“(1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.”⁶¹

- b) Akibat Pembatalan Perkawinan

Pisahny suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak.⁶² Pisahny suami istri karena *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya *fasakh* karena khiyar baligh, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.⁶³

Bila terjadi *fasakh* baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusny perkawinan karena *fasakh* itu suami tidak boleh ruju” kepada mantan istrinya

⁶¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 98-99.

⁶² Sebab Talak Ada Talak *Ba’In* Dan Talak *Raj’I*. Yang Pada Talak *Raj’I* tidak mengakhiri ikatan Suami Istri Dengan Seketika, Sedang Talak *Ba’In* Mengakhiri Seketika Itu Juga.

⁶³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.* hal.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama istrinya menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu berstatus bain sughra.⁶⁴

Dengan demikian, dapat disebut bahwa pembicaraan terkait pembatalan perkawinan mengesankan bahwa perkawinan itu sebelumnya telah berlangsung dan bisa jadi buah perkawinan itu telah ada seperti anak dan harta bersama.⁶⁵

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2: “Keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan (c) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁶⁶

Sedangkan menurut KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 dijelaskan. Pasal 75: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal. 253.

⁶⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006,) hal. 113

⁶⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 546.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kekuatan hukum tetap.” Pasal 76 menyatakan: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”⁶⁷

c) Pembatalan Perkawinan Hubungannya dengan Kematian Istri

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang

⁶⁷ Abdul Gani Abdullah, *Op Cit.*, hal. 99-100.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *faskh*.⁶⁸

6. Hikmah Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Hikmah dibolehkannya Pembatalan Perkawinan adalah memberi kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa Perkawinan itu mungkin menemukan hal hal tidak mungkin keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, atau Perkawinan itu akan merusak hubungan keduanya.

B. Pemalsuan Identitas

1. Pengertian pemalsuan

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris yaitu *Manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.⁶⁹

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal.197.

⁶⁹ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hal,372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁷⁰

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁷¹

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁷²

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil,

⁷⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal,712

⁷¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal,7

⁷²Ahmad Sukardja, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), hal,9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena asal dari surat itu ialah palsu. kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.

Masalah yang menyebabkan pemalsuan identitas jenis kelamin karena disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri.
- b. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat.
- c. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan, akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan walinya.
- d. Ketidakteraturan dan kelemahan sistem administrasi kependudukan pintu utama untuk melakukan pemalsuan identitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Modusnya, tahu sama tahu, komitmen untuk merahasiakan ditambah dengan iming-iming, sejumlah uang, selembar KTP palsu dapat diperoleh.
- f. Perangkat aparat yang negoitable atau modus konspirasi (persekongkolan) masih tetap eksis sampai sekarang.
- g. Kurang bagusya koordinasi antara pejabat/petugas pencatat perkawinan yang berwenang menanganinya.
- h. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, termasuk hukum munakahat belum merata dikalangan masyarakat dan instansi-instansi yang mengakibatkan kurangnya hukum.⁷³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu pula sebaliknnya. Pengecualian bagi suami untuk memiliki lebih dari satu isteri hanya apabila diizinkan oleh pengadilan. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan. Selaian itu harus ada jaminan bahwa suami akan bertindak adil dan mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukan dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

a. Faktor-faktor yang menyebabkan individu memalsukan syarat-syarat perkawinan antara lain karena:

1) Surat-surat tidak lengkap

Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan suatu permainan, karena perkawinan mempunyai kedudukan hukum, baik hukum menurut syariat Islam maupun hukum menurut undang-undang. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya harus mendaftarkan dirinya kepada Kantor Desa Setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau kelurahan setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan.

2) Calon mempelai masih dibawah umur.

Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun , bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih dibawah umur.

- 3) Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain.
- 4) Mengubah identitasnya.

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pemalsuan

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (*Akhlak Madzmumah*) yang apabila seorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam al-qur'an, dan Hadis Rasulluah SAW, sebagai berikut :

- a. Q.S An-Nahl 105

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُوْنَ (١٠٥)

Artinya : sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan merek itu orang-orang pendusta. (Q.S. A-Nahl : 105)⁷⁴

Orang yang telah berikrar kepada Allah kemudian mengingkari janjinya itu, dan orang-orang berdusta kepada Allah sehingga tidak

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menepati janjinya, maka hatinya tidak akan selamat dari kemunafikan. Maka sudah sepantasnya pengingkaran janji dan kebohongan terhadap Allah ini mengakibatkan timbulnya nifaq yang kekal didalam hati orang-orang yang diisyatkan dalam ayat diatas.⁷⁵

b. Hadits Rasulullah SAW :

Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i yang berbunyi :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّخِذْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Artinya :”barang siapa yang dusta kepadaku (atas namaku) dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya didalam neraka”, (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. An-Nasa'i).

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dengan demikian untuk memperkuat kejelasan dari status identitas maka dibutuhkannya administrasi kependudukan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa

⁷⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2003), hal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penyalahgunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Selain itu dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Hal ini dilakukan karena administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen.

3. Bentuk-bentuk pemalsuan

Dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.⁷⁶

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. Dapat menimbulkan suatu hak (mislnya: ijazah, karcis menerbitkan suatu perjanjian, dan lain-lain);

⁷⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- d. Surat yang digunakan sebagai surat keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut seosilo dilakukan dengan cara :

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b. Memalsukan surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga mengubah isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senangtiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah suatu dari surat itu.
- c. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian pemalsuan surat.
- d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah:

- a. Pada pemalsuan surat itu harus dengan bermaksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli , dan tidak dipalsukan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penggunaanya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup;
- c. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan identitas, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
Sudah dianggap “mempergunakannya” misalnya menyerahkan kepada surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
- d. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.⁷⁷

C. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari dua kata yaitu *poli* dan *gami*. Secara etimologi, *poli* artinya banyak dan *gami* artinya istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang.⁷⁸

⁷⁷ Ibid R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

⁷⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'a did al -Zaujah* (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut bermaduan.

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan lebih dari seorang, sedangkan poliandri memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligimi. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang poliandri. Menurut ajaran Islam, yang disebut dengan syari'at Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah dilakukan. Dengan demikian, meskipun dalam surat an-nisa' ayat 3 ada kalimat *fankihu* kalimat *amr* tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib, dapat direlevasikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi *الأصل في لأشياء الإباحة* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil mengharamkannya).⁷⁹

Dalam hukum Islam poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atas suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang

⁷⁹ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

wenang kepada istri istri nya, sebagai pemimpin akan berbuah kedzaliman kepada rakyat.

Muhammad Abduh mengatakan dalam *tafsir al-manar* yang ditulis oleh Muhammad rasyid ridha, “meskipun Agama Islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil”.⁸⁰

Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi di keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam poligami disebabkan beberapa hal yang wajar, yaitu:

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya; kemandulan.
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri.
3. Suami yang hypersexual sehingga penyaluran yang lebih dari seorang istri.
4. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki.
5. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk berpoligami.

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang ke bumi. Sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum Islam lahir, poligami telah dilakukan oleh semua bangsa, seperti bangsa Asia,

⁸⁰ *Ibid*, hal.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

eropa, afrika, dan amerika. Di jazirah Arab, terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil sehingga berusaha membunuhnya, maka mereka berlomba lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan.

Menurut Rahmad Hakim, poligami telah dijalankan oleh bangsa bangsa semenjak zaman primitive, bahkan hingga sekarang. Bangsa romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya.⁸¹

Menurut Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah” adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri istri nya. Batiniah, menurut khazin nasuha tidak dituntut oleh syariat Islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan manusia. Rasulullah sangat cenderung cintanya kepada aisyah daripada istri lainnya.”

Suami harus dapat berlaku adil dalam makan, minum, makanan, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal giliran. Ia tidak boleh sewenang wenang atau berbuat dzalim karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian. Adil bukan berarti semuanya harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh.

⁸¹ Ibid hal.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sayyid sabiq poligami adalah “salah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki, laki-laki adalah makhluk allah yang memiliki kecenderungan sexual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodrat nya, tetapi sangat naïf dan irasional. Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariaat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.”

Untuk mengangkat harkat dan martabat hukum wanita, allah mewajibkan kepada semua kaum laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan bathin. Tidak dibenarkan mendzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Hal demikian oleh sayyid sabiq dikatakan kaarena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkam kaum laki-laki melakukan perzinahan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangga nya. Kedailan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dibimbing nya.⁸²

⁸² Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad, *Op Cit.* hal.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dasar Hukum Poligami

Kaitan dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukum adalah sebagai berikut:

An-nisa ayat 3:

وَإِنْ حِفْظُ الْأَتَقِصْتُوْا فِي الْيَتَمِ فَأَنْكِحُوا مَا بَلَغَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْظُ الْأَتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”. (Q.S An-Nisa : 3)⁸³.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat an-nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri sedangkan ayat An-Nisa: 3 memerintahkan berlaku adil. Padahal tidak dapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berlaku adil dalam persoalan perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.⁸⁴

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah Bin Mas’ud r.a ia berkata,”Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, “hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah dia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR.Bukhari-Muslim)

Hadis diatas adalah perintah kepada pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Apabila belum mampu menikah, lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.⁸⁵

Hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Berisi lebih dari seorang dilakukakn oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan rasulullah digambarkan dalam hadist tersebut tentang tatacara mempraktekan keadilan dalam poligami. Raslullah membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. sementara keadilan dalam “Hati” Beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan

⁸⁴ Ibid, hal 35

⁸⁵ Ibid, hal 36

dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.⁸⁶

2. Syarat Poligami Menurut Islam

Mengenai prsedur atau tatacara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan kompilasi hukum Islam nya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang haru mendapatkan izin dari pengadilan agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No.9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, krtiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuata hukum.

b. Pasal 57

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

⁸⁶ Ibid, Hal 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan kepada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang undang No.1 tahun 1974, yaitu:
- 2) Adanya persetujuan istri.
- 3) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri istri dan anak anak mereka.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf B peraturan pemerintan No.9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri istri dapat diberikan secara tulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tulisan, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada siding pengadilan agama.
- 5) Persetujuan dimakdus pada ayat (10) huruf A tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri istri nya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri istri nya sekurang kurang nya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu dapat penilaian hakim.

d. Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan

mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁸⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷ *Ibid.* Hal 134-136

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian yang penulis tulis diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan tetang analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama pekanbaru nomor Nomor : 0181/Pdt.G/2017/Pa.Pbr mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Dalam fiqih Islam diantara syarat sah terjadinya pembatalan pernikahan akibat adanya pemalsuan identitas diri. Terdapat salah satu syarat yang berbunyi Adanya hal-hal yang merusak pernikahan setelah terjadinya akad. Syarat tersebut menjadikan ulama bersepakat mengqiyaskan Perbuatan pemalsuan identitas tesebut termasuk kedalam golongan adanya hal-hal merusak pernikahan setelah terjadinya akad dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan tersebut yang bisa menimbulkan *kemudhorotan* untuk rumah tangga mereka kelak dan tidak mungkin untuk bersatu kembali. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yaitu: *الضرر يزال* yang artinya *kemudhorotan* itu harus dihilangkan. arti *Faskh* disini adalah rusak dan sudah jelas pernikahan Rudi Hidayat dan Dika Irawati melakukan penipuan yang mengakibatkan pernikahan tersebut merugikan istri pertama rudi hidayat maka dari itu sangat layak untuk dibatalakan menurut hukum Islam dan undanga-undang pernikahan, dan pembatalanya perkawinan tersebut dibatalkan melalui pengadilan agama setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

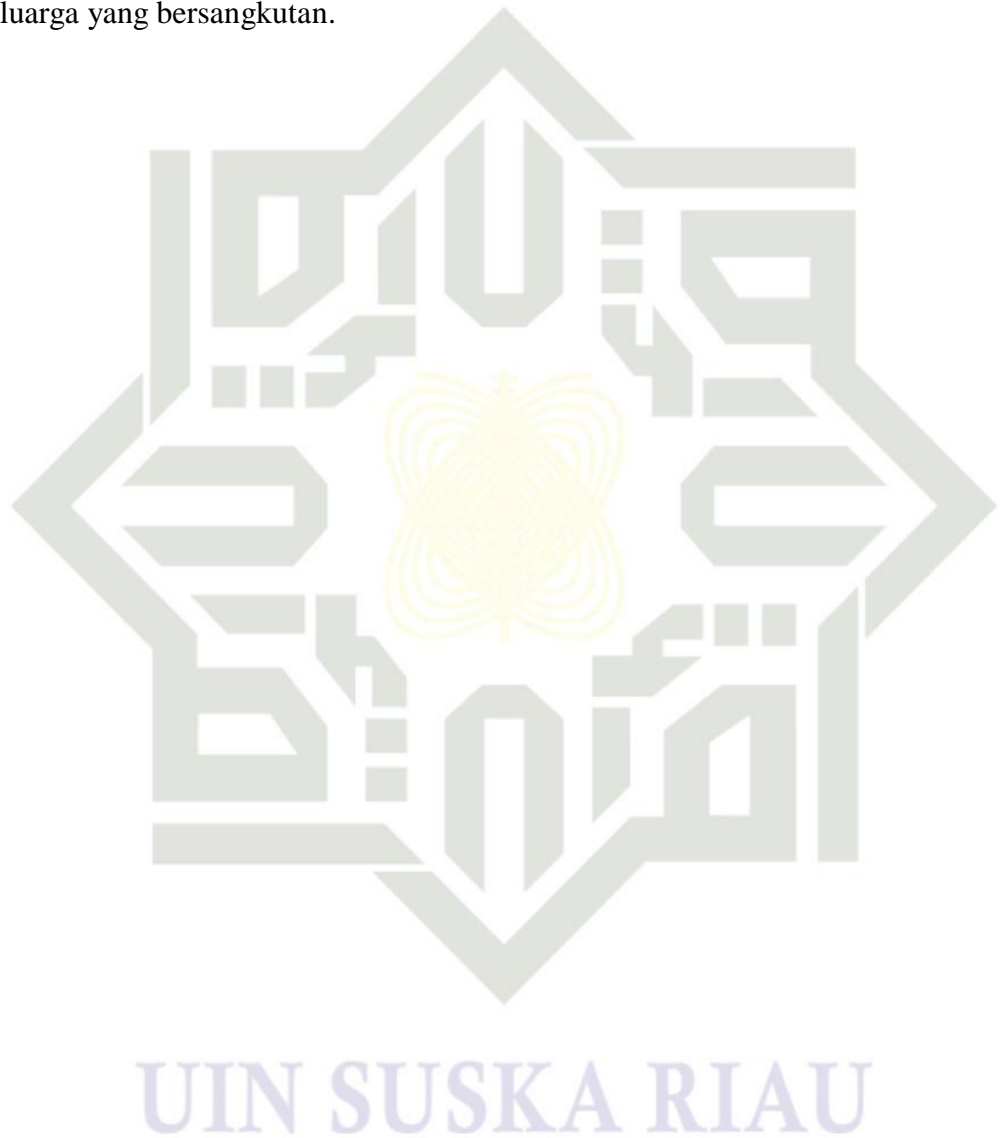
Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi melanggar hukum atau peraturan perundangan-undangan. Sedangkan landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah PP o. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan No 7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, dan inpres No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Serta tentang pendapat para ulama/fuqoha dan perkataan Al-Qur'an Dan Hadits yang membahas tentang perkara tersebut. Dan putusan pengadilan agama pekan baru menurut undang-undang sesuai dengan yang berlaku.

B. Saran

Saran dari penulis sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang belum menikah ataupun yang akan menikah supaya sadar bahwa memalsukan identitas tersebut sangatlah merugikan kedua belah pihak, dan hal tersebut termasuk menyeludupkan hukum, maka dari itu dimohon untuk tidak melakukan pemalsuan identitas dalam melaksanakan pernikahan tersebut.
2. Bagi pasangan yang sudah menjadi suami istri apalagi sang suami dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada istri dan Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama jikalau ingin melakukan poligami.
3. Bagi para petugas pencatatan perkawinan (PPN) dalam melakukan pencatatan perkawinan seharusnya lebih teliti lagi dalam memeriksa setiap

berkas-berkas yang diajukan oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, dan tidak hanya memandang berkas secara administrasi saja namu diupayakan sebisa mungkin untuk turun kelapangan langsung, setidaknya bertanya langsung kepada penduduk setempat atau sama keluarga yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid Roihan, 1991, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Vc. Rajawali Pers.
- Abdullah Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah Boedi Dan Saebani Ahmad Beni, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abidin Slamet Dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Alhamdani .H.S.A 1989, *Risalah Nikah Trj. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Munawarah Said Agil Husain, 2004, *Hukum Islam Dan Pluraritas Sosial*, Jakarta: Penamadani,Cet 1.
- Anwar, Moch H.A.K., 1990, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya.
- Aripi Jaenal, 2008, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arto Mukti, 1996, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- As-Siddqi Tm.Hasbi, 1998, *Al-Islam*, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra. Cet,1.
- Azz Abdul, 1993, *Perkawinan Yang Harmonis*, Jakarta: CV. Firdaus.
- Binti Cik Hasan, 2003, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Abdul Aziz, 2013, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru.
- Dei Rohayana Ade, 2008, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan Nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdilan Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Do A. Rahman I, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah*, (Syari'ah), Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, Cet 1.
- Fauzan M, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-2.
- Ghozali Abdurrahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dalam Agama*, Bandung: Mandarmaju.
- Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : CV, Pustaka Setia.
- _____, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi Ahmad, 1995, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang. Cet. 7.
- Harahap Yahyah, 2005, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan Abbas, 1995, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Se-Wilayah Riau*, Pekanbaru.
- [Http://Answer.Yahoo.Com/Question/Index%3Fqid%3020090424223954aadmkn](http://Answer.Yahoo.Com/Question/Index%3Fqid%3020090424223954aadmkn)
Diakses Tanggal 29 Desember 2018 Pukul 22.00 WIB
- [Http://www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/D33/Wanprestasi-DanPenipuan](http://www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/D33/Wanprestasi-DanPenipuan),
Diakses Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 21.30 WIB
- Imron Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Kompilasi Hukum Islam, 2008, *Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pengertian Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Luis Sulaikin, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- M Echols John Dan Shadily Hasan, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- M. Thalib, 1999, *25 Tuntutan Upacara Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Manan Abdul, 2000, *.Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Manan Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakara : Sinar Grafika, Cet. Ke-2.
- Mertokusumo Sukdino, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Anshary M, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media.
- Nuruddi Amiur Dan Akmal Tarigan Azhari, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Nurudin Amiur, Tarigan Akmal Azhri, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Agama Pekanbaru, *Putusan Perkara Nomor: 0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr*. Pekanbaru
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3.
- Quthb Sayyid, 2003, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani Pers.
- Rasjidi Lili, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Tahun 2017.
- Rofiq Ahmad, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani Beni Ahmad, 2001, *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayyid Sabiq Sayyid, 2009, *Fiqih Sunnah 2*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara.
- Shomad Abd, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1.
- Siregar SY. Effendi, Dkk, 2007, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyaakarta: Liberty.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Subekti. R. Tjitrosudibio R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta,Cet. Ke-2.
- Sukardja Ahmad, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sukardja Ahmad, 2008,*Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-3.
- _____, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana.
- Tri Wahyudi Abdullah, 2004, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Titik Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Pramedia Media Grup.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Yusuf Mahmud,1989,*Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: (0181/PDT.G/2017/PA.PBR) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami*, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD HIDAYAT**
NIM : 11421100523
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 12 November 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
Sekretaris
Syukran, M.Sy
Penguji I
Kamiruddin, M.Ag
Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A

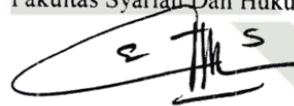

.....

.....

.....

.....

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah Dan Hukum



Eri Susanto, SH.I
NIP. 19670218 199303 1 006

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.JurnalHukumIslam.com email. admin@JurnalHukumIslam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD HIDAYAT**

NIM : **11421100523**

Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: (0181/PDT.G/2017/PA.PBR) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami**

Pembimbing : **Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru,

Februari 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

MUHAMMAD HIDAYAT, Dilahirkan Di kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Tepatnya di Tanjung Balai Karimun Kecamatan Tebing Desa Pongkar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 1995. Anak ke tujuh (7) dari tujuh (7) bersaudara pasangan dari bapak Abd. Kamar. U dan ibu Rainah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SD 005 Desa Pongkar di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah di MTS AR-RAUDHAH. Jl. Pertambangan, Teluk Uma, Tebing, Tlk. Uma, Kec. Karimun Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MA Unit Sekolah Baru (USB) / sekarang dikenal dengan MAN KARIMUN. Jl. Paya Cincin Sei Bati, Kecamatan Tebing Karimun. dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau (UIN SUSKA) Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah atau dikenal dengan Hukum Keluarga. Peneliti menyelesaikan kuliah strata 1 (s1) pada, hari Selasa, 12 November 2019.

UIN SUSKA RIAU

uska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.